



Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

I Nyoman Trisna Wahyu Raharja Meranggi

Komang Adi Sastra Wijaya

Gek Aris Veratiani

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: raharjameranggi788@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function from the perspective of staff empowerment at Class IIA Kerobokan Correctional Facility. The prison faces significant challenges, including severe overcrowding with an occupancy rate exceeding 254% of its ideal capacity-along with limited human resources and inadequate facilities. A qualitative descriptive approach was used, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation involving prison staff, inmates, and relevant stakeholders. The implementation framework proposed by George Edward III, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, served as the basis for analysis. The findings reveal that the supervisory function is not yet optimal due to a lack of human resources, insufficient training, and high workloads. Although communication among staff is generally effective, implementation remains constrained by limited infrastructure and the absence of supportive technologies. While staff exhibit a generally positive disposition, this needs to be reinforced by a more adaptive bureaucratic structure and concrete policy support. Therefore, empowering staff through capacity building, regular training, and the provision of adequate facilities is essential to enhance supervisory effectiveness and the success of inmate rehabilitation programs.

Keywords: Correctional Facility, Supervision, Staff Empowerment, Policy Implementation, Overcrowding

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan. Lapas ini menghadapi tantangan serius berupa overkapasitas dengan tingkat hunian mencapai lebih dari 254% dari kapasitas ideal, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas lapas, narapidana, dan pemangku kepentingan terkait. Teori implementasi kebijakan George Edward III digunakan sebagai kerangka analisis dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal akibat keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, dan beban kerja tinggi. Meskipun komunikasi antar petugas cukup baik, implementasi pengawasan masih terkendala oleh minimnya fasilitas fisik dan sistem pendukung teknologi. Disposisi petugas yang umumnya positif perlu didukung oleh struktur birokrasi yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, pemberdayaan petugas melalui peningkatan kapasitas, pelatihan rutin, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan keberhasilan program pembinaan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Petugas, Pengawasan, Lapas, Overkapasitas

I. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana. Fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban internal, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia serta keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi salah satu fungsi utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan

tugas pemasyarakatan. Pengawasan yang baik tidak hanya menjamin stabilitas internal lembaga, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan program pembinaan yang dijalankan (Permenkumham No. 33 Tahun 2015).

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah kondisi di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali. Lapas ini merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan terbesar dan paling aktif di Provinsi Bali, yang sejak lama mengalami persoalan serius terkait overkapasitas. Berdasarkan data terakhir, tingkat hunian di Lapas Kerobokan telah mencapai lebih dari 254% dari kapasitas ideal, dengan jumlah penghuni mencapai 1.472 orang, sementara kapasitas nominal hanya 466 orang (Laporan ANTARA, 2023). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan psikologis warga binaan, tetapi juga menimbulkan tekanan besar terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Overkapasitas di Lapas Kerobokan telah menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Kepadatan yang tinggi menyebabkan terbatasnya ruang gerak, meningkatnya risiko konflik antar narapidana, serta menurunnya kualitas layanan dasar seperti kesehatan, kebersihan, dan makanan. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti ruang rehabilitasi, sarana olahraga, dan ruang pendidikan semakin memperburuk efektivitas program pembinaan. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan menjadi semakin krusial, baik dalam aspek preventif maupun represif. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran, menjaga ketertiban, serta memastikan bahwa warga binaan mengikuti program pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yudiana et al., 2019).

Namun, efektivitas pengawasan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas dan pemberdayaan petugas pemasyarakatan. Dalam konteks Lapas Kerobokan, jumlah petugas yang tersedia sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, stres berkepanjangan, dan potensi menurunnya motivasi kerja. Selain itu, keterbatasan pelatihan, kurangnya dukungan teknologi, serta struktur birokrasi yang kaku turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, pemberdayaan petugas menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji dan ditingkatkan, guna memastikan bahwa fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Permenkumham No. 33 Tahun 2015; Denpasarkota, 2019).

Pemberdayaan petugas dalam konteks pemasyarakatan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, hingga penciptaan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme dan integritas. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Keempat indikator ini menjadi kerangka analisis yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi pengawasan di Lapas Kerobokan telah diimplementasikan secara efektif dalam perspektif pemberdayaan petugas.

Komunikasi merupakan faktor pertama yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks Lapas Kerobokan, komunikasi antara pimpinan dan petugas lapas dilakukan melalui briefing harian, rapat koordinasi, serta penggunaan media internal seperti surat edaran dan sistem informasi digital. Komunikasi yang efektif memungkinkan penyampaian instruksi yang jelas, koordinasi lintas unit yang baik, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti perbedaan persepsi antar petugas dan keterbatasan sarana komunikasi di beberapa area lapas (Wawancara, 2025).

Faktor kedua adalah sumber daya, yang mencakup baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Jumlah petugas pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti CCTV, alat komunikasi, dan ruang pengawasan turut menghambat efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, pihak lapas telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan rutin, pembinaan teknis, serta kerja sama dengan instansi terkait. Pelatihan ini mencakup aspek teknis seperti penanganan gangguan keamanan, serta

pengembangan soft skills seperti komunikasi dan manajemen stres (Wawancara, 2025).

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor ketiga yang tidak kalah penting. Komitmen dan motivasi petugas dalam menjalankan tugas pengawasan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Di Lapas Kerobokan, sebagian besar petugas menunjukkan sikap profesional dan dedikasi tinggi, meskipun menghadapi beban kerja yang berat. Untuk menjaga semangat kerja, pihak lapas menerapkan sistem penghargaan, pembinaan rutin, serta menciptakan lingkungan kerja yang komunikatif dan suportif. Namun, tetap diperlukan dukungan yang lebih kuat dari sisi manajemen dan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan motivasi tersebut (Wawancara, 2025).

Faktor terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur organisasi yang jelas dan sistem pelaporan yang terstruktur menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pengawasan. Di Lapas Kerobokan, struktur birokrasi telah dirancang untuk mendukung koordinasi antar unit, dengan pembagian tugas yang spesifik dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan tugas pengawasan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti prosedur administrasi yang rumit, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi internal yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan (Permenkumham No. 8 Tahun 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan di Lapas Kelas IIA Kerobokan belum berjalan secara optimal, meskipun telah menunjukkan arah yang positif. Tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan, keterbatasan fasilitas, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, pemberdayaan petugas menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana keempat indikator dalam teori Edward III berperan dalam implementasi fungsi pengawasan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat pemberdayaan petugas di lingkungan pemasyarakatan.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks administrasi pemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan praktis bagi Kementerian Hukum dan HAM, pengelola Lapas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan petugas yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan secara menyeluruh.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial melalui deskripsi naratif berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengungkap secara sistematis kondisi aktual di lapangan, termasuk dinamika komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci seperti Kepala Lapas, Sub Seksi Keamanan, petugas pengawasan, dan warga binaan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dan kompetensi mereka terhadap isu yang diteliti (Sugiyono, 2015). Observasi dilakukan dengan pendekatan *participant as observer*, di mana peneliti hadir sebagai pengamat aktif untuk memahami konteks sosial dan operasional pengawasan di lapas. Dokumentasi berupa arsip, foto, dan dokumen kebijakan digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat validitas data.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan sebagai institusi

yang menjadi locus implementasi fungsi pengawasan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, alat perekam suara, dan kamera dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, kemudian disusun dalam bentuk narasi tematik. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk paragraf yang menggambarkan temuan lapangan secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi metodologis, sumber, dan teoritis. Triangulasi metodologis dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki posisi berbeda. Sementara triangulasi teoritis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori dan regulasi yang relevan, seperti Permenkumham No. 33 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 8 Tahun 2024 (Flick, 2018; Patton, 2015).

IV. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan belum berjalan secara optimal, meskipun telah menunjukkan arah yang positif. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, terdapat empat indikator utama yang dianalisis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, ditemukan bahwa Lapas Kerobokan telah menerapkan sistem komunikasi yang cukup terstruktur. Instruksi kebijakan disampaikan melalui briefing harian, rapat koordinasi, dan surat edaran kepada seluruh petugas. Komunikasi dilakukan secara vertikal dan horizontal, memungkinkan koordinasi antara pimpinan, petugas pengamanan, dan unit terkait lainnya. Petugas juga diberikan ruang untuk menyampaikan umpan balik melalui forum diskusi dan pelatihan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sarana komunikasi di beberapa area dan perbedaan persepsi dalam menafsirkan prosedur pengawasan. Meskipun demikian, komunikasi yang berjalan dua arah telah membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif dan kondusif.

Indikator sumber daya menunjukkan bahwa jumlah petugas pengawasan masih belum ideal dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang sangat melebihi kapasitas. Lapas Kerobokan dihuni oleh lebih dari 1.400 narapidana, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 466 orang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi dan potensi penurunan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak lapas telah melakukan pelatihan rutin bagi petugas, baik secara langsung maupun daring, termasuk webinar dan simulasi penanganan gangguan keamanan. Selain itu, pengajuan pembangunan fasilitas baru dan penambahan sarana pendukung pengawasan sedang dalam proses. Meskipun keterbatasan masih menjadi tantangan, komitmen petugas untuk menjalankan tugas secara profesional tetap terjaga.

Pada indikator disposisi, ditemukan bahwa sikap dan komitmen petugas terhadap pelaksanaan tugas pengawasan cukup tinggi. Petugas menunjukkan dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan disiplin. Motivasi kerja berasal dari kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman dan mendukung proses pembinaan. Hambatan yang muncul lebih bersifat eksternal, seperti overkapasitas dan keterbatasan fasilitas, bukan karena kurangnya komitmen. Untuk menjaga semangat kerja, pihak lapas menerapkan sistem penghargaan, pembinaan rutin, dan pelatihan soft skills seperti komunikasi dan manajemen stres.

Indikator terakhir, yaitu struktur birokrasi, menunjukkan bahwa Lapas Kerobokan memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistem pelaporan yang teratur. Pembagian tugas antar unit telah dirancang untuk

mendukung koordinasi dan pelaksanaan pengawasan. Namun, beberapa prosedur administrasi masih dirasakan rumit dan kurang fleksibel, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Terdapat pula tumpang tindih kewenangan antara petugas lapas dan instansi eksternal seperti BNN dan kepolisian, yang kadang menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, pihak lapas berupaya menyederhanakan proses birokrasi dan memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan di Lapas Kerobokan telah berjalan dengan prinsip profesionalisme dan humanisme, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Komunikasi yang terbuka, pelatihan rutin, dan komitmen petugas menjadi faktor pendukung utama. Sementara itu, keterbatasan sumber daya, prosedur birokrasi yang kompleks, dan overkapasitas penghuni menjadi faktor penghambat yang perlu segera ditangani.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan petugas merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Upaya peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas yang memadai, serta reformasi birokrasi internal perlu terus dilakukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Komunikasi

Indikator komunikasi dalam implementasi fungsi pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan bahwa komunikasi antar petugas berjalan efektif melalui briefing harian, rapat koordinasi, serta pelaporan berkala dari pos pengamanan dan menara pengawas setiap satu jam. Sistem komunikasi yang terstruktur ini mendukung pengawasan yang responsif dan terkontrol dengan baik, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di lapas secara optimal. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana komunikasi di beberapa area dan perbedaan persepsi dalam menafsirkan prosedur yang kadang menghambat kelancaran komunikasi. Upaya peningkatan pelatihan komunikasi dan perbaikan sarana komunikasi terus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara keseluruhan, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam keberhasilan fungsi pengawasan di Lapas Kerobokan, terutama dalam mendeteksi dini gangguan keamanan dan memastikan koordinasi antar petugas berjalan lancar.

3.2.2 Sumber Daya

Indikator sumber daya menunjukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas masih menjadi tantangan utama. Jumlah petugas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang sangat melebihi kapasitas membuat beban kerja petugas menjadi sangat tinggi, sehingga pengawasan kurang maksimal dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan khusus, terutama dalam bidang kesehatan kejiwaan, serta fasilitas yang belum memadai juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan. Faktor anggaran yang terbatas turut mempengaruhi kemampuan lapas dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengawasan. Meski demikian, upaya peningkatan jumlah petugas secara bertahap dan pelaksanaan pembinaan kerja bagi warga binaan telah dilakukan untuk meminimalisir gangguan keamanan. Secara keseluruhan, sumber daya yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan profesional di Lapas Kerobokan.

3.2.3 Disposisi

Indikator disposisi dalam implementasi fungsi pengawasan di Lapas Kelas IIA Kerobokan menunjukkan bahwa sikap dan komitmen petugas terhadap tugas pengawasan cukup baik dan profesional. Petugas menunjukkan kedisiplinan tinggi serta kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawabnya, termasuk dalam melakukan patroli rutin, pengawasan langsung, dan penanganan gangguan keamanan. Namun, terdapat beberapa tantangan terkait motivasi yang terkadang menurun akibat beban kerja yang berat dan kondisi lapas yang overkapasitas. Untuk mengatasi hal ini, manajemen lapas secara rutin melakukan pembinaan dan motivasi melalui pelatihan, evaluasi kinerja, serta pemberian penghargaan bagi petugas yang berprestasi. Disposisi positif ini sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas,

sekaligus meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan secara keseluruhan. Meski demikian, perlu terus diperkuat agar semangat dan profesionalisme petugas tetap terjaga dalam jangka panjang.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi dalam hasil analisis temuan implementasi fungsi pengawasan di Lapas Kelas IIA Kerobokan menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas dan terstruktur memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pengawasan. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit serta jenjang koordinasi yang sistematis memudahkan alur komunikasi dan pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan pengawasan berjalan lebih terorganisir dan efisien, serta mempercepat respons terhadap gangguan keamanan. Namun, terdapat beberapa kendala birokrasi yang masih perlu diperbaiki, seperti prosedur administrasi yang kadang memakan waktu dan kurang fleksibel dalam menghadapi situasi darurat. Untuk itu, upaya penyederhanaan proses dan peningkatan koordinasi lintas unit terus dilakukan guna mendukung kelancaran fungsi pengawasan. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang ada saat ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kerobokan, namun perlu disempurnakan agar lebih adaptif dan responsif.

Keempat, prosedur administrasi yang cenderung rumit dan kurang fleksibel sehingga memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah petugas yang tersedia menyebabkan struktur birokrasi kurang efektif dalam mendistribusikan tugas secara optimal.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil serta analisis temuan yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti. Penelitian ini memuat hasil bahwa implementasi Fungsi Pengawasan sudah dapat dikatakan berjalan dengan efektif tetapi belum optimal. Pelaksanaan pengawasan sangat bergantung pada pemberdayaan petugas melalui peningkatan kompetensi, disiplin, dan motivasi yang terus-menerus. Dukungan manajemen yang menekankan profesionalisme, koordinasi yang baik antar petugas, serta pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat efektivitas pengawasan. Selain itu, pendekatan humanis dalam pelayanan kepada warga binaan juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan pemberdayaan petugas yang optimal, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembinaan dan keamanan di Lapas Kerobokan. Sesuai dengan indikator teori yang dikemukakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat disimpulkan penelitian terkait implementasi fungsi pengawasan melalui indikator teori oleh Edward III, sebagai berikut:

1. Indikator Komunikasi. Komunikasi. Pada indikator komunikasi yang dikemukakan oleh Edward III, komunikasi yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana atau warga binaan untuk melakukan pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP dan peraturan kebijakan yang ada pada Lapas Kerobokan.
2. Indikator Sumber Daya. Sumber daya yang dimiliki oleh lapas kerobokan memang belum memadai dalam jumlah personil yang ada pada lapas, akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut sudah dilakukan pelatihan yang secara rutin sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengawasan sudah pasti berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Indikator Disposisi. Yang ada pada Lapas kerobokan meliputi sikap positif, komitmen, dan motivasi petugas pengawas dalam menjalankan tugasnya. Disposisi yang baik tercermin dari kesungguhan petugas untuk melaksanakan pengawasan dengan profesional dan konsisten, meskipun menghadapi tantangan seperti overkapasitas dan beban kerja tinggi. Komitmen ini didukung oleh pembinaan rutin, pelatihan, serta penghargaan yang diberikan untuk menjaga semangat dan dedikasi petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas.

4. Indikator Struktur Birokrasi. Adanya peraturan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan di lapas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, melalui hasil dan analisis temuan yang didapatkan dalam implementasi Fungsi Pengawasan. Terdapat beberapa saran yang diberikan guna meningkatkan pelaksanaan implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di lembaga pemsarakatan kelas IIA kerobokan, sebagai berikut:

5. Peningkatan Kompetensi Petugas Lapas perlu mengadakan pelatihan dan pembinaan rutin untuk meningkatkan kemampuan teknis dan soft skills petugas, terutama dalam hal pengawasan, komunikasi, serta penanganan situasi darurat. Hal ini penting agar petugas lebih profesional dan percaya diri dalam menjalankan tugas. Penambahan dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia Mengusulkan penambahan jumlah petugas pengawas agar beban kerja lebih merata dan pengawasan dapat dilakukan secara maksimal, terutama mengingat overkapasitas penghuni lapas. Optimalisasi penjadwalan shift juga diperlukan untuk menjaga konsistensi pengawasan.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Memperbaiki dan melengkapi fasilitas pendukung seperti CCTV, alat komunikasi, dan pos pengawasan agar pengawasan lebih efektif dan meminimalisir celah keamanan.
7. Penguatan Sistem Komunikasi dan Koordinasi Membangun sistem komunikasi yang lebih efisien antar petugas dan antar unit kerja, termasuk mekanisme pelaporan yang cepat dan akurat, sehingga koordinasi pengawasan berjalan lancar.
8. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kembali penelitian yang dibuat oleh peneliti. Peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam penelitian terkait implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan. Serta, dapat mengkaji lebih dalam terhadap kualitas Petugas yang dihasilkan melalui inovasi ini.

Daftar Pustaka

- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Permenkumham No. 33 Tahun 2015. *Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Permenkumham No. 8 Tahun 2024. *Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudiana, I. G. N., et al. (2019). *Efektivitas Pengawasan di Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(2), 123–135.
- Denpasarkota. (2019). *Laporan Tahunan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan*. Pemerintah Kota Denpasar.
- Laporan ANTARA. (2023). *Kondisi Overkapasitas Lapas Kerobokan Capai 254%*. ANTARA News.
- Wawancara. (2025). *Hasil Wawancara dengan Petugas Lapas Kerobokan*. Dokumentasi Penelitian.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.